

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu Negara berkembang yang jumlah penduduknya sangat besar. Sebagai Negara kepulauan, penduduk Indonesia memiliki persebaran yang tidak merata. Berbagai masalah yang merupakan akibat dari persebaran penduduk yang tidak merata kerap kali muncul dan mendesak pemerintah untuk sesegera mungkin bertindak untuk mengambil sebuah kebijakan.

Disamping itu, faktor pertumbuhan penduduk yang besar dengan persebaran yang tidak merata serta rendahnya kualitas penduduk juga menjadi sumber permasalahan yang berkaitan dengan kependudukan di Indonesia. Pertumbuhan penduduk yang pesat dan tidak merata serta tanpa diimbangi dengan pencapaian kualitas SDM yang tinggi mengakibatkan berbagai permasalahan-permasalahan kependudukan yang antara lain adalah kemiskinan, kesehatan, dan pengangguran. Keselarasan jumlah penduduk yang besar akan menuntut adanya keselarasan terhadap segi kualitas sumber daya manusia yang baik pula. Akan timbul permasalahan-permasalahan menyangkut penduduk disebuah Negara apabila terjadi ketimpangan yang nyata antara jumlah penduduk yang besar dengan dukungan sumber daya manusia yang relatif rendah. Kedua aspek itulah yang perlu dijaga keseimbangannya agar permasalahan-permasalahan tidak mudah mencuat dan mengganggu stabilitas pembangunan disuatu Negara. Ketepatan dan ketersediaan data-data tentang penduduk

yang lengkap dalam pembangunan di Negara kita merupakan aspek yang memegang peran yang sangatlah penting. Ini menuntut kerja keras para penyelenggara Negara mulai dari tingkat pusat sampai ke tingkat yang paling bawah didalam mengumpulkan dan menjamin ketersediaan data penduduk yang dibutuhkan dalam rangka dukungan informasi mengenai kependudukan yang baik untuk pihak yang berwenang dalam merumuskan kebijakan di Indonesia.

Berkaitan dengan pembangunan kependudukan, pembangunan administrasi kependudukan sebagai sebuah sistem merupakan bagian yang tak terpisahkan dari administrasi pemerintahan dan administrasi Negara dalam memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak individu penduduk. Perlindungan tersebut berupa pelayanan publik melalui penerbitan dokumen kependudukan seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan akta-akta catatan sipil, termasuk akta kelahiran. Dengan jumlah penduduk yang cukup besar, serta maraknya berbagai kejahatan kriminal dan terorisme baik dalam skala nasional maupun internasional, dengan pemalsuan dokumen identifikasi kependudukan (termasuk paspor, KK, dan lain-lain), diperlukan adanya penataan agar administrasi kependudukan dapat lebih tertib dari tahun ke tahun dan terpadu secara nasional. Meningkatkan dan ketertiban dan keterpaduan administrasi kependudukan akan sangat berguna bagi perumusan kebijakan, perencanaan dan pelaksanaan berbagai program pembangunan. Kemajuan teknologi informasi dalam mendukung berbagai kegiatan termasuk pelayanan administrasi kependudukan merupakan suatu tuntutan yang tidak bisa diabaikan.

Menyikapi berbagai permasalahan itu pemerintah berusaha memperoleh data tentang kependudukan di Indonesia yang akurat untuk mampu membuat pemetaan yang tepat guna penanggulangan masalah kependudukan baik ditingkat lokal dan nasional. Data tersebut di perlukan untuk mampu membuat sebuah program dalam rangka pengendalian jumlah pertumbuhan, dan pemerataan persebaran penduduk.

Dalam pengelolaan pendaftaran penduduk merupakan tanggung jawab pemerintah kota/kabupaten, dimana dalam pelaksanaannya diawali dari desa selaku ujung tombak pendaftaran penduduk, hingga setiap warga terdaftar secara administrasi sebagai warga Negara Indonesia dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. Dalam pelayanan tersebut perlu dilakukan dengan benar dan cepat agar penduduk sebagai pelanggan merasa dapat pelayanan yang memuaskan.

Sebagai salah satu langkah untuk membantu berbagai pekerjaan mengenai pendaftaran kependudukan yang sesuai dengan berbagai standar yang di perlukan maka pemerintah memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Pada mulanya program ini diberi istilah SIMDUK (sistem informasi manajemen kependudukan) pada tahun 1996. Namun pada pelaksanaannya dilapangan, sistem ini memiliki banyak kelemahan sebagai sebuah sistem yang mengelola data kependudukan. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap SIMDUK, maka pemerintah Indonesia membuat program baru yaitu SIAK (sistem informasi administrasi kependudukan) sebagai sistem yang mengolah data kependudukan dan catatan sipil di Indonesia. Kelebihan dari SIAK selain untuk mendata penduduk secara akurat tetapi juga dapat

memberikan NIK yang secara otomatis dan tetap untuk satu penduduk, sehingga dapat mengeliminasi terjadinya kepemilikan identitas ganda.

Keberadaan sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK) akan menghasilkan data kependudukan yang akurat baik dari segi jumlah penduduk, tingkat ekonomi, pendidikan, dan lain-lain. Sehingga dengan data yang akurat tersebut berguna untuk implementasi kebijakan atau program pemerintah lainnya seperti pendataan statistik, menentukan daftar pemilih tetap untuk pemilihan umum dan pemilihan umum kepala daerah, sebagai acuan pemberian bantuan langsung tunai (BLT) atau bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM), dan pedoman untuk pengambilan kebijakan publik lainnya.

SIAK bisa menjadi solusi dari berbagai permasalahan kependudukan yang ada, dengan adanya pengelolaan data secara online maka kelemahan-kelemahan pengolahan data secara konvensional dapat ditekan. SIAK sendiri memberikan banyak manfaat antara lain, hasil perhitungan dan pengelolaan data secara statistic tersebut dapat digunakan sebagai bahan perumusan dan penyempurnaan kebijakan, strategi dan program bagi penyelenggaraan dan pelaksanaan pembangunan lainnya serta penerapan SIAK ini dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain, sarana dan prasarana, sumber daya manusia dan sosialisasi.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 pasal 13 tentang Nomor Induk Kependudukan maka pemerintah mengeluarkan sebuah peraturan baru yang tertuang dalam PP Nomor 37 Tahun 2007 yang memuat tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006. Dari hasil observasi lapangan pertanggal 4

Oktober 2016 dimana Kecamatan Bongomeme mulai melaksanakan program ini berdasarkan Peraturan daerah Nomor 1 Tahun 2009. Kecamatan Bongomeme merupakan salah satu daerah yang telah menerapkan sistem ini. Perda Nomor 1 Tahun 2009 berisi tentang pedoman penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di Kecamatan Bongomeme.

Salah satu latar belakang dibuatnya sistem ini tentunya untuk mampu melakukan pemetaan yang tepat tentang komposisi penduduk, kepadatan penduduk, masalah kemiskinan yang dihadapi penduduk dipelosok. Serta melihat kemajuan apa yang telah mampu dicapai oleh pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan dan kesehatan. Tentunya tujuan ini perlu koordinasi dengan dinas lain yang bersangkutan. SIAK diharapkan mampu memberikan nomor induk penduduk yang telah terdaftar di Depdagri untuk memudahkan pemerintah pusat dan daerah guna melihat permasalahan penduduk yang ada serta meningkatkan kualitas pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Namun hingga saat ini masih ada masyarakat Kecamatan Bongomeme yang belum memiliki nomor induk penduduk tersebut, sehingga masih banyak masyarakat yang belum masuk dalam hitungan ataupun perkiraan dapat dibantu oleh pemerintah.

Kantor kecamatan bongomeme kabupaten gorontalo adalah salah satu instansi pemerintah yang melaksanakan program pendataan penduduk dan pencatatan sipil sebagai instansi pelaksana di bawah naungan instansi penyelenggara departemen dalam negeri (DEPDAGRI), dan memberi pelayanan kepada masyarakat dalam hal kemudahan pendataan penduduk dan pencatatan sipil. Kantor Kecamatan

Bongomeme juga sudah menerapkan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).

Melihat progress dari kantor Kecamatan Bongomeme berdasarkan observasi dari peneliti, terdapat beberapa perubahan terjadi antara lain perbaikan fasilitas guna menunjang nyaman dan kemudahan dalam pendataan penduduk dan pencatatan sipil bagi masyarakat salah satunya adalah penyediaan gedung tersendiri khusus untuk pelayanan administrasi publik terpadu kecamatan (PATEN), serta di lengkapi dengan komputer untuk mengakses data kependudukan secara online.

Disamping ketersediaan gedung tersendiri serta dilengkapi dengan komputer untuk mengakses data kependudukan secara online terdapat beberapa permasalahan yang kiranya patut diperhatikan terkait dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) pada kantor Kecamatan Bongomeme, antara lain: 1) jumlah komputer yang ada hanya berjumlah satu buah dengan jumlah masyarakat 35.980.000 atau lima belas desa. 2) tingkat disiplin jam kerja masih kurang, 3) kurangnya perawatan terhadap peralatan elektronik sebagai fasilitas kantor Kecamatan Bongomeme.

Berdasarkan pemaparan diatas, penulis merasa tertarik untuk meneliti tentang bagaimana penerapan program SIAK secara langsung dilapangan yang meliputi tahapan-tahapannya, manfaat, permasalahan dan hasil yang di peroleh oleh masyarakat. Oleh karena itu penulis mengangkatnya ke dalam sebuah penelitian yang berjudul: **“Penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) pada kantor Kecamatan Bongomeme”**

1.2 Identifikasi Masalah

1. jumlah komputer yang ada hanya berjumlah satu buah dengan jumlah masyarakat 35.980.000 atau lima belas desa.
2. tingkat disiplin pegawai terhadap jam kerja masih kurang.
3. kurangnya perawatan terhadap peralatan elektronik sebagai fasilitas kantor Kecamatan Bongomeme.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan, penulis merumuskan masalah menjadi pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) pada Kecamatan Bongomeme ?
2. Faktor-faktor apa saja mempengaruhi dan solusinya bagi Penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) pada Kecamatan Bongomeme ?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan Penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) pada Kecamatan Bongomeme.
2. Untuk menganalisis faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Penerapan dan Solusi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) pada Kecamatan Bongomeme.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini akan memberikan manfaat bagi berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat tersebut adalah:

1. Manfaat Akademik

Manfaat dari akademis adalah dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis terutama yang berkaitan dengan teori tentang administrasi dan pembangunan umumnya dalam pembangunan bidang pelayanan publik, khususnya dalam penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Serta dijadikan bahan referensi bagi mereka yang juga akan melakukan penelitian di bidang yang sama.

2. Manfaat secara praktis

Penulis berharap agar penelitian ini dapat memberikan informasi yang berkaitan dengan penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Dengan kata lain membantu pihak organisasi dalam hal menyadari pentingnya penerapan SIAK dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.

1.6 Tempat Penelitian dan Waktu Penelitian

Adapun lokasi yang dijasikan sebagai objek penelitian adalah kantor Kecamatan Bongomeme Kabupaten Gorontalo. Penelitian ini dilaksanakan selama dua bulan dari bulan September 2016 sampai dengan bulan November 2016.

1.7 Sumber Data

data yang dikumpul untuk mendukung penelitian ini adalah data yang benar-benar diperoleh dari sumber yang dipercaya keabsahanya, yaitu:

- a. Data Primer, merupakan data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara untuk memberikan informasi dan keterangan yang ada di kantor Kecamatan Bongomeme Kabupaten Gorontalo.
- b. Data sekunder, merupakan data yang diperoleh secara tertulis dan digunakan sebagai bahan pendukung terhadap objek penelitian ini.

1.8 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Wawancara (*interview*)

Teknik wawancara adalah teknik primer dalam pengumpulan data pada penelitian ini. wawancara peneliti dengan informan yang dilakukan secara terarah, bebas. Alat pengumpulan data adalah pedoman wawancara.

- b. Observasi

Teknik observasi pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan alat pengumpul data yaitu panduan pengamatan/observasi. Dengan demikian pengamat selaku peneliti secara pribadi harus mengembangkan daya pengamatannya terhadap penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan pada kantor Kecamatan Bongomeme Kabupaten Gorontalo. peneliti tidak terlibat langsung atau tidak terlibat secara penuh dalam kegiatan yang diamati. Peneliti hanya melihat-lihat, mendengarkan mewawancarai dan akan mengembangkan sendiri kebutuhan dilapangan sepanjang tidak menyimpang dari apa yang telah digariskan dalam tujuan penelitian. Peneliti menggunakan panduan pengamatan tentang hal-hal yang akan

diamati dalam proses kegiatan atau aktivitas kantor. Pengamatan dilakukan dengan mendatangi langsung kantor Kecamatan Bongomeme. Peneliti melakukan pencatatan hasil pengamatan agar dapat terhindar dari kesalahan akibat kelupaan, *on the spot* (pencatatan langsung) dalam buku yang disediakan.

c. Dokumen

Alat pengumpulan datanya adalah pencatatan dokumen. Metode ini digunakan untuk menjaring informasi yang tersaji dalam bentuk dokumen, seperti kebijakan tertulis, mekanisme dan prosedur atau informasi lainnya yang terkait dengan penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan pada Kecamatan Bongomeme Kabupaten Gorontalo.

1.9 Teknik Analisis Data

Data yang didapatkan di lapangan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif dimaksudkan untuk menggambarkan bagaimana penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan pada Kecamatan Bongomeme Kabupaten Gorontalo yang dikaji dalam penelitian ini.

Secara runtut, teknik analisis data dilakukan melalui tahapan seperti diuraikan di bawah ini.

1. Reduksi data (Data Reduction)

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis untuk menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang data yang tidak perlu, dan mengorganisasi sehingga kesimpulannya dapat ditarik dan diverifikasi.

2. Penyajian data (Data Display)

Dalam kegiatan ini dilakukan penyajian data sekumpulan informasi yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam konteks penelitian ini, penyajian tersebut dilakukan dalam bentuk teks hasil wawancara langsung dengan informan.

3. Penarikan kesimpulan atau verifikasi data

Penarikan kesimpulan adalah upaya mencari inti data yang tercatat, mengenai pola-pola penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang ada, alur sebab akibat, dan proposisi. Kegiatan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi, merupakan kegiatan yang jalin-menjalin antara sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk yang sejajar.